

BAB 10

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1 Kesimpulan

Daerah Aliran Sungai Musi meliputi daerah seluas kira-kira 60.000 km². Merupakan sungai terbesar ke-4 di Negara Indonesia. Populasi di daerah aliran sungai adalah lebih dari 6,3 juta dan cukup besar dibandingkan dengan ke-3 daerah sungai terbesar lainnya. Daerah aliran pada utamanya berada di Propinsi Sumatera Selatan, tetapi meliputi beberapa bagian propinsi Bengkulu, Jambi dan Lampung . Pembangunan dan konservasi daerah aliran menjadi perhatian nasional.

Daerah Aliran Sungai Musi mempunyai potensi yang besar dari tanah dan pembangunan berbagai sumber daya. Daerah aliran berada di zona strategi untuk swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Air yang berada di daerah aliran digunakan untuk berbagai macam keperluan dan penggunaan sumber daya tidak hanya untuk penduduk yang tinggal di daerah aliran tetapi untuk seluruh bangsa. Di dalam daerah aliran, walapun, pembangunan telah dijalankan tanpa memperhatikan konservasi dan sebagai hasilnya, terdapat masalah yang beraneka ragam.

Pendahuluan dari Pengelolaan Air Secara Menyeluruh dianggap penting dan mendesak dalam rangka merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan menjaga keseimbangan dengan konservasi lingkungan di Daerah Aliran Sungai Musi. Rencana Pengelolaan yang dirumuskan mencakup 6 komponen: Pengelolaan Tata Guna Air; Pengelolaan Dataran Genangan; Konservasi dan rehabilitasi DAS; Perbaikan Lingkungan Air Perkotaan; Pembuatan Jaringan Kerja Pemantauan dan Perkuatan Kelembagaan.

Tiap komponen mencakup program yang konkret. Program yang harus diberikan prioritas tertinggi telah dipilih sebagai prioritas program. Rangkuman program telah dipersiapkan untuk mempermudah pemahaman garis besar dari tiap-tiap program prioritas. Untuk pelaksanaan prioritas program, rencana pelaksanaan telah disiapkan; organisasi pelaksanaan dan penugasan telah diidentifikasi; biaya dan jadwal pengeluaran tahunan telah disiapkan; dan aktivitas rencana telah disiapkan.

BAPPEDA Propinsi Sumatera Selatan diharapkan melaksanakan koordiansi keseluruhan untuk pelaksanaan rencana pengelolaan. Hasil evaluasi program adalah sebagai berikut: tidak adanya kesulitan tehnikal untuk pelaksanaan dari program prioritas jika bantuan tehnikal dari negara-negara maju dengan berpengalaman dalam pengelolaan air di wilayah Asia muson disediakan. Walaupun pelaksanaan dari program tidak langsung menciptakan keuntungan ekonomi, hal tersebut merupakan dasar untuk pengelolaan daerah aliran yang layak yang pada akhirnya memberikan banyak keuntungan ekonomi untuk daerah aliran. Secara financial, peningkatan pemasukan APBN dibutuhkan untuk pelaksanaan program prioritas. Diharapkan banyak keuntungan lingkungan dan social melalui pelaksanaan program-program prioritas.

Prasyarat yang dibuthkan untuk rencana pengelolaan yang diajukan adlah; (i) mempertahankan kebijakan desentralisasi oleh Pemerintah Indonesia; dan (ii) pelaksanaan Undang-Undang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan

10.2 Rekomendasi

Pelaksanaan program prioritas menurut jadwal yang diajukan adalah sangat diusulkan untuk pendahuluan dari Rencana Pengelolaan Air Secara Menyeluruh untuk Daerah Aliran Sungai Musi. Pelaksanaan kegiatan utama untuk memulai pelaksanaan pengelolaan diusulkan sebagai berikut:

Diusulkan bahwa **BAPPEDA** Propinsi Sumatera Selatan akan berkoordinasi untuk kegiatan sebagai berikut: (i) Rencana Pengelolaan Air Secara Menyeluruh yang diajukan harus disahkan pada Rencana Strategi Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004-2008 mendatang; dan Keputusan Pemerintah Propinsi untuk pelaksanaan rencana induk yang diajukan harus disiapkan dan digunakan.

Program 1-6: Modeling Pengelolaan Tata Guna Air adalah salah satu dari program mendesak yang dibutuhkan sejak model merupakan perangkat dasar untuk pengelolaan air yang layak. Pelaksanaan program memerlukan bantuan tehnikal dari negara-negara maju dengan berpengalaman dalam model pengelolaan air daerah aliran di wilayah Asia muson. **Dirjen Sumber Daya Air** diusulkan untuk memulai persiapan TOR guna bantuan tehnikal.

Data kualitas air dan hidrologi dibutuhkan untuk penggunaan dalam Model Pengelolaan Tata Guna Air yang didiskusikan di atas. Tanpa data ini, model tidak dapat digunakan dengan layak; lalu, dibutuhkan koordinasi terpadu dengan modeling pengelolaan tata guna air. Diusulkan bahwa **Balai PSDA Musi** berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan memulai diskusi dengan BMG, BAPEDALDA, PDAM untuk jaringan kerja pemantauan di daerah aliran untuk masa mendatang, dan untuk menyiapkan TOR untuk mendapatkan APBN.

Pengelolaan dataran banjir harus dipertimbangkan sebagai sebuah program jangka panjang selama 50-100 tahun, tetapi hal tersebut dimulai mendesak sebelum proses pembangunan yang tidak terkendali di dataran banjir. Dapat dikatakan bahwa kegiatan **Dinas PU Pengairan** berpengaruh besar pada Daerah Aliran Sungai Musi di masa mendatang. Diusulkan untuk merumuskan sebuah kelompok yang bertanggungjawab di bawah Dinas PU Pengairan dan untuk memulai kegiatan yang diperlukan.

Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dapat memulai kegiatan untuk program konservasi dan rehabilitasi DAS. Pembuatan gugus tugas dan aktivitasnya dianggap mendesak. Juga Diusulkan juga untuk memulai diskusi dengan Kimpraswil untuk kesimpulan dari Daerah Aliran Sungai Musi ke dalam "Daftar Prioritas Derah Aliran Sungai untuk Reboisasi" disiapkan bergabung dengan Menteri Kehutanan dan Kimpraswil.

Dinas Kimpraswil Kotamadya Palembang diusulkan untuk memulai pelaksanaan program. Seleksi LSM yang akan dilibatkan di dalam Program Pengelolaan Drainase Masyarakat dianggap mendesak. Skema yang layak untuk bantuan aktivitas dari LSM harus juga dipertimbangkan.

Dinas PU Pengairan diusulkan untuk mengidentifikasi program yang mencakup WISMP. Hal tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk kemajuan program pada Daerah Aliran Sungai Musi di bawah WISMP.